

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2021



**DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2021, telah selesai disusun.

Dengan tersusunnya LKIP Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2021, maka dapat dilihat gambaran capaian kinerja penyelenggaraan perhubungan di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Cirebon selama tahun 2021.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya seluruh staf dengan tersusunnya LKIP Dinas Perhubungan Kota Cirebon tahun 2021 ini, semoga dapat bermanfaat untuk tercapainya kinerja penyelenggaraan perhubungan ke depan yang lebih baik.

Cirebon, Januari 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA CIREBON**

  
**Drs. ANDI ARMAWAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691214 199003 1 005

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023.

Dalam rangka pencapaian membantu visi Walikota Cirebon "Sehati Kita Wujudkan Kota Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah", misi ke-3 Walikota Cirebon yang menjadi acuan pelaksanaan urusan Perhubungan yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan" maka ditetapkan rencana kinerja yang berisi target kinerja yang hendak dicapai selama periode Tahun 2022. Rencana kinerja tersebut telah diformalkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2022 yang menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator sasaran yang hendak diwujudkan melalui pelaksanaan 2 program dan 15 kegiatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan pertanggung jawaban kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam mencapai sasaran strategis. Laporan ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2021 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2021 yang melibatkan seluruh bidang Dinas Perhubungan, Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen pencapaian kinerja dengan hasil pengukuran kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Perhubungan Kota Cirebon memperoleh anggaran sebesar Rp. 28.982.051.360,00 digunakan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 serta untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Realisasi anggaran yang dilakukan sebesar 95, % dari total anggaran yang diterima pada tahun tersebut.

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I     PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Susunan Organisasi dan TUPOKSI.....	2
a. Tugas Pokok.....	2
b. Fungsi.....	2
c. Struktur Organisasi.....	3
1.3. Isu – Isu Strategis.....	25
1.4. Inovasi dalam penyelenggaraan tugas.....	25
BAB II    PERENCANAAN KINERJA.....	29
2.1. Rencana Strategis .....	29
2.2. Arah Kebijakan .....	31
2.3. Indikator Kinerja Utama .....	34
2.4. Perjanjian Kinerja .....	35
2.5. Rencana Anggaran .....	35
BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA.....	39
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	39
3.2. Akuntabilitas Keuangan .....	52
BABA IV   PENUTUP.....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan .....	24
Gambar I.2 Aplikasi Smart PJU .....	26
Gambar I.3 Aplikasi QRIS .....	26
Gambar I.4 Tampilan Website SIGFLLAJ .....	27
Gambar I.5 Pantauan lalu lintas melalui ATCS .....	28
Gambar III.1 Pengaturan Lalu Lintas oleh tim DALOPS .....	43
Gambar III.2 Perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum oleh Tim PJU .....	43
Gambar III.3 Giat 68 oleh anggota Dinas Perhubungan Kota Cirebon .....	44
Gambar III.4 Penutupan ruas jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon .....	44
Gambar III.5 Pantauan Lalu Lintas dari ATCS Dishub Kota Cirebon .....	45
Gambar III.6 Perbaikan Lampu Insyarat Lalu Lintas Oleh Tim yang bertugas .....	45
Gambar III.7 Webinar dengan Kepala Dinas Perhubungan terkait Sosialisasi Keselamatan Pesepeda di Jalan .....	46
Gambar III.8 Kegiatan operasi masker oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon dan SKPD lainnya .....	46
Gambar III.9 Kegiatan PAM Pengamanan dalam rangka Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 .....	47
Gambar III.10 Dialog interaktif dengan topik Teknologi ATCS meminimalisir kecelakaan lalu lintas bersama Kepala Dinas Perhubungan live di RRI Pro Kota Cirebon .....	47
Gambar III.11 Kegiatan Apel gelar pasukan Dinas Perhubungan Kota Cirebon ...	48
Gambar III.12 Kegiatan Kunjungan Wali Kota Cirebon bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon beserta jajarannya .....	49
Gambar III.13 Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Penguji PKB .....	49
Gambar III.14 Bus Rapid Transit (BRT) .....	50

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Sasaran dan Indikator Dinas Perhubungan Kota Cirebon tahun 2021 ..	30
Tabel II.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Cirebon .....	32
Tabel II.3 Indikator Kinerja Utama .....	34
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja DISHUB Tahun 2021 .....	35
Tabel III.1 Hasil pengukuran IKU DISHUB Tahun 2021 .....	40
Tabel III.2 Capaian Sasaran 1 Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas .	41
Tabel III.3 Tingkat Pelayanan Jalan atau LOS .....	41
Tabel III.4 LOS target jalan yang diturunkan titik rawan macet .....	42
Tabel III.5 Capaian Sasaran 1 Tersedianya Angkutan Umum Massal Yang Ramah Lingkungan .....	48
Tabel III.6 Data Kendaraan PKB Kota Cirebon Tahun 2021 .....	50
Tabel III.7 Capaian Sasaran 1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik .....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang wajib dibuat oleh penyelenggara negara termasuk Satuan Kerja Instansi Pemerintah Daerah (SKPD). SAKIP dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Di dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh SKPD termasuk Dinas Perhubungan diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun. Untuk periode tahunan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Selanjutnya DPA tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun Perjanjian Kinerja SKPD.

Laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai SKPD berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) yang wajib disusun setiap akhir tahun termasuk oleh Dinas Perhubungan.

## **1.2. SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON**

Dinas Perhubungan Kota Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.

Sedangkan Dasar Hukum pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon adalah Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

### **a. Tugas Pokok**

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan.

### **b. Fungsi**

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

### **c. Struktur Organisasi**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Cirebon telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:

#### **a. Unsur Organisasi**

Unsur organisasi Dinas terdiri dari :

- 1) unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;
- 2) unsur staf adalah Sekretaris;
- 3) pembantu unsur staf adalah Kepala Sub Bagian;
- 4) unsur lini adalah Kepala Bidang;
- 5) pembantu unsur lini adalah kepala Seksi;
- 6) UPT; dan
- 7) pelaksana teknis operasional dan/atau administrasi adalah kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

#### **b. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cirebon terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  3. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari:
    - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
    - b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
    - c. Seksi Prasarana Lalu Lintas.
  4. Bidang Angkutan dan Multimoda, terdiri dari :
    - a. Seksi Perencanaan Jaringan Trayek;
    - b. Seksi Penyediaan, Pembinaan dan Pengendalian Angkutan; dan
    - c. Seksi Terminal dan Multimoda.
  5. Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana, terdiri dari:
    - a. Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan;
    - b. Seksi Penyuluhan Keselamatan; dan
    - c. Seksi Pengendalian dan Operasional.
  6. Unit Pelaksana Teknis; dan
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Tugas dan Unsur Organisasi

#### **A. Kepala Dinas**

##### 1. Tugas pokok

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

## 2. Fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
- 2) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dinas operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas;
- 3) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 5) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 6) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

## **B. Sekretariat**

### 1. Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan administratif Dinas

### 2. Fungsi

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian;

- c. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
- d. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang perhubungan;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
- g. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
- h. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sekretariat membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Tugas Pokok

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

(2) Fungsi

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencanakerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Program dan Keuangan

(1) Tugas Pokok

Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/ informasi untuk penyajian bahan penyusunan

perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

(2) Fungsi

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencanakerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan dan pengelolaan keuanganDinas;
- c. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuanganDinas;
- d. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidangPerhubungan;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuanganDinas;
- f. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerjaDinas;
- g. penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerjaDinas;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan;dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Bidang Lalu Lintas**

#### 1. Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan bidang lalu lintas.

#### 2. Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Lalu Lintas;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Lalu Lintas;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Lalu Lintas;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Lalu Lintas;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Lalu Lintas;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Lalu Lintas;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Lalu Lintas; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup

bidang tugasnya.

3. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :

a. Seksi Manajemen Lalu Lintas

(1) Tugas Pokok

Seksi Manajemen Lalu Lintas sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas penyelenggaraan manajemen lalu lintas.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Manajemen LaluLintas;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Manajemen LaluLintas;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Manajemen LaluLintas;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidangtugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi

Manajemen LaluLintas;

g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas; dan

h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas

(1) Tugas Pokok

Seksi Rekayasa Lalu Lintas sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan rekayasa lalu lintas.

(2) Fungsi

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Rekayasa LaluLintas;

b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Rekayasa LaluLintas;

c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Rekayasa LaluLintas;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Rekayasa LaluLintas;

e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan

pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Rekayasa LaluLintas;

g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan

h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Seksi Prasarana Lalu Lintas

(1) Tugas Pokok

Seksi Prasarana Lalu Lintas sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan prasarana lalu lintas.

(2) Fungsi

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Prasarana LaluLintas;

b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Prasarana LaluLintas;

c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Prasarana LaluLintas;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Prasarana LaluLintas;

e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Prasarana LaluLintas;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Prasarana Lalu Lintas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

#### **D. Bidang Angkutan dan Multimoda**

##### 1. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan angkutan dan multimoda.

##### 2. Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda;
- c. Pelaksanaan fungsi tugas pokok Bidang Angkutan dan Multimoda;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda;

- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Angkutan dan Multimoda;
  - f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Angkutan dan Multimoda;
  - h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
3. Bidang Angkutan dan Multimoda, membawahkan:
- a. Seksi Perencanaan Jaringan Trayek
    - (1) Tugas Pokok

Seksi Perencanaan Jaringan Trayek sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan angkutan dalam trayek.
    - (2) Fungsi
      - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
      - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi Bidang, lingkup Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;

- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek; dan;
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Seksi Penyediaan, Pembinaan dan Pengendalian Angkutan

(1) Tugas Pokok

Seksi Penyediaan, Pembinaan dan Pengendalian Angkutan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan AngkutanBarang;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan AngkutanBarang;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan AngkutanBarang;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidangtugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidangtugasnya.
- c. Seksi Terminal dan Multimoda
- (1)Tugas Pokok

Seksi Terminal dan Multimoda sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan terminal dan multimoda.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Terminal dan Multimoda;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Terminal dan Multimoda;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Terminal dan Multimoda;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Terminal dan Multimoda;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Terminal dan Multimoda;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Terminal dan Multimoda; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

## **E. Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana**

### 1. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan keselamatan dan tehnik sarana.

### 2. Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup

bidang tugasnya.

3. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, membawahkan:

a. Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan

(1) Tugas Pokok

Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan audit dan investigasi keselamatan.

(2) Fungsi

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;

b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;

c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;

e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan

pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;

g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan; dan

h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Seksi Penyuluhan Keselamatan

(1) Tugas Pokok

Seksi Penyuluhan Keselamatan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyuluhankeselamatan.

(2) Fungsi

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi PenyuluhanKeselamatan;

b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan;

c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Penyuluhan Keselamatan;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi PenyuluhanKeselamatan;

e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Penyuluhan Keselamatan;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- c. Seksi Pengendalian dan Operasional
- (1) Tugas Pokok

Seksi Pengendalian dan Operasional sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pengendalian dan operasional.
  - (2) Fungsi
    - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional;
    - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional;
    - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Seksi Pengendalian dan Operasional;

- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Seksi Pengendalian dan Operasional;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengendalian dan Operasional;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

#### **F. Unit Pelayanan Teknis (UPT)**

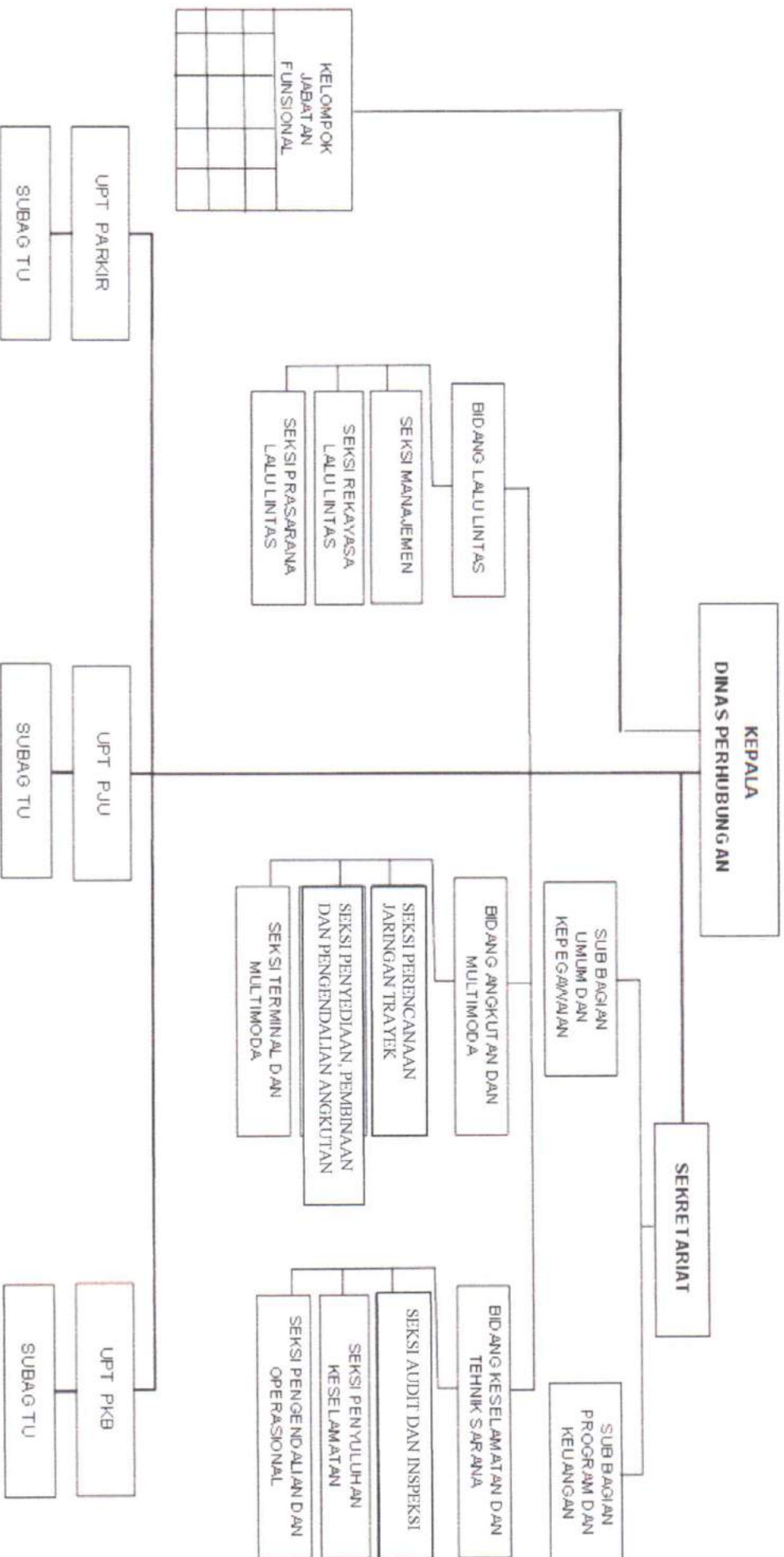
- a. UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
- b. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### **G. Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- d. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- e. Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- f. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON



Gambar I.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

### **1.3. ISU – ISU STRATEGIS**

Beberapa isu penting di Dinas Perhubungan Kota Cirebon, diantaranya adalah :

1. Pengembangan Taman Edukasi Lalu Lintas;
2. Pengembangan ATCS;
3. Peningkatan Kualitas SDM Dinas Perhubungan yang Handal dan Profesional;
4. Kesemerawutan Lalu Lintas pada ruas - ruas jalan CBD;
5. Perlintasan Kereta Api Sebidang;
6. Angkutan Massal Perkotaan;
7. Adanya angkutan umum berbasis aplikasi (online);
8. Aksesibilitas Transportasi Bandara Kertajati;
9. Pengaturan Angkutan Barang Dalam Kota;

### **1.4. Inovasi Dalam Penyelenggaraan Tugas**

Inovasi Dinas Perhubungan Kota Cirebon :

#### **1. Smart Card Uji Kir**

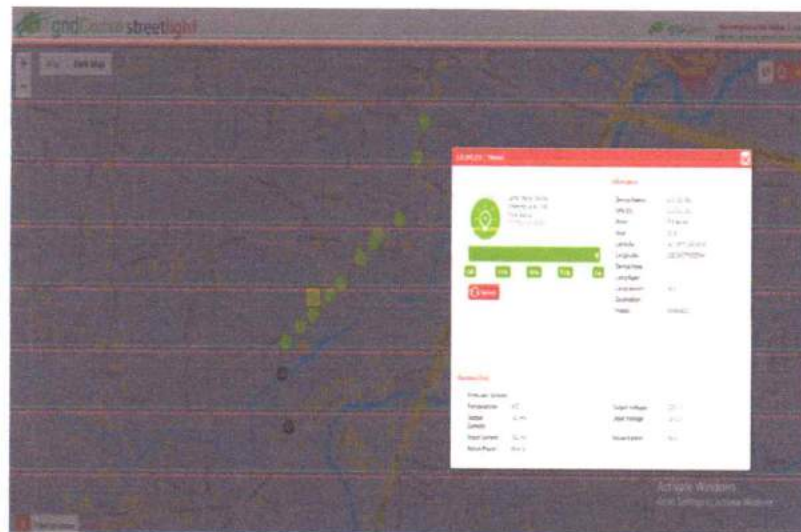
Kartu yang di peruntukan untuk pengguna kendaraan wajib KIR sebagai pengganti dari buku uji KIR.

#### **2. Smart PJU**

Pembaruan penggunaan lampu PJU dengan lampu Light Emitting Diode (LED) dapat memudahkan dalam pengontrolan penggunaan lampu Pju di Kota Cirebon, aplikasi yang digunakan inilah yang dinamakan Smart PJU.

Smart PJU berbentuk website yang hanya dapat di akses oleh Ka UPT PJU Dinas Perhubungan Kota Cirebon, yang berfungsi untuk mengetahui jumlah lampu PJU yang mati dan hidup serta dapat mengontrol daya Lampu PJU di Kota Cirebon

sehingga dapat memudahkan UPT PJU dalam memberikan layanan untuk masyarakat.



**Gambar I.2** Aplikasi Smart PJU

### 3. Parkir Non Tunai QRIS

Adalah bentuk pembayaran parkir secara non tunai (gopay,ovo,shopeepay,dll) yang sudah diterapkan pada jalan pagongan, dan nanti kedepannya akan diterapkan di seluruh kantong parkir di Kota Cirebon.



**Gambar I.3** Aplikasi QRIS

#### 4. Sistem Informasi Geografis Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Adalah website yang bisa diakses masyarakat untuk mengetahui informasi terkait fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan di ruas jalan Kota Cirebon.  
<http://sigflaj.cirebonkota.go.id/>



**Gambar I.4** Tampilan Website SIGFLAJ

#### 5. ATCS (Area Traffic Control System)

Pengendalian lalu lintas di persimpangan Kota Cirebon secara terpusat pada ruang kendali di Dinas Perhubungan Kota Cirebon melalui CCTV yang terpasang di beberapa persimpangan di Kota Cirebon.



**Gambar I.5** Pantauan lalu lintas melalui ATCS

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### 2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra – Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Cirebon, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan. Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon sehingga semua langkah - langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018 - 2023. Visi dan Misi Walikota Cirebon:

**Visi** adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Sesuai dengan arah kebijakan Kota Cirebon 2018 - 2023 maka seluruh Perangkat Daerah diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi Misi Kota Cirebon tahun 2018 - 2023, dimana Visi Kota Cirebon selama 5 tahun adalah

**“SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis  
Budaya dan Sejarah”**

**Misi** adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. misi dapat juga didefinisikan sebagai penjabaran suatu visi dimana dibuat dengan lebih lengkap sehingga dapat dipahami setiap orang yang membacanya. Sedangkan misi yang ditetapkan walikota Cirebon berdasarkan visi tersebut adalah :

- 1) Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya, Unggul dalam Segala Bidang;

- 2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa dan inovatif;
- 3) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan;
- 4) Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum yang kondusif;

Dan untuk Dinas Perhubungan Kota Cirebon mengacu pada visi misi diatas maka yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan urusan Perhubungan Kota Cirebon terdapat 1 (satu) rumusan Misi Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 - 2023 yang ada relevansi dan keterkaitannya Untuk mendapat dukungan dan diaktualisasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon yaitu Misi ke 3 sebagai berikut :

**Tabel II.1**  
Sasaran dan Indikator  
Dinas Perhubungan Kota Cirebon  
Tahun 2021

Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra DISHUB	Indikator Kinerja Utama	2021
<i>Misi Ke-3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan.</i>			
Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Jalan	Menurunnya titik rawan kemacetan lalu lintas	Jumlah rawan titik kemacetan	3 titik
Meningkatkan Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat	Tersedianya angkutan umum massal yang ramah lingkungan	Rasio jumlah armada yang ramah lingkungan terhadap jumlah armada	8 unit
	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	90%

Tabel diatas menjelaskan bahwa apa yang menjadi sasaran dan indikator Dinas Perhubungan Kota Cirebon digunakan untuk mendukung visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Cirebon sehingga dapat berjalan selaras dengan apa yang menjadi visi dan misi ke-3 Kota Cirebon.

## 2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrument langkah-langkah dalam perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Perhubungan agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan cakupan pelayanan perhubungan.

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**  
**Dinas Perhubungan Kota Cirebon**

VISI : "SEHATI KITA WUJUDKAN KOTA CIREBON SEBAGAI KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA DAN SEJARAH  
MISI I : "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan"

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat	Tersedianya Angkutan Umum Masal Yang Ramah Lingkungan	Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan	tinggi dan tepat guna, membangun sistem angkutan massal, meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan umum melalui peremajaan armada bus sedang, penambahan dan penataan trayek, penataan tempat pemberhentian angkutan umum serta pelayanan hari-hari besar

MISI II : "Mewujudkan Ketentraman dan Keteraturan Umum yang Kondusif"

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Jalan	Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas	Optimalisasi rekayasa, sosialisasi dan pengendalian lalu lintas dalam rangka	Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, pengendalian dan pengamanan lalu
		Mengoptimalkan standar keselamatan lalu lintas	Menerapkan standar pengujian kendaraan bermotor
		Menata sistem perpakiran yang sudah ada serta menyediakan fasilitas parkir	Penerapan / perubahan geometris sistem parkir, penerapan sistem perpakiran

### 2.3 Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kota Cirebon melalui Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Utama (IKU). Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan indikator kinerja utama Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2019-2023. Indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama						Sumber Data	Keterangan
Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra SKPD		2019	2020	2021	2022	2023		
Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan	Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan Satuan	Nilai C	Nilai C	Nilai B	Nilai B	Nilai B	Renstra 2019 - 2023 Dishub Kota Cirebon	
		Jumlah Titik Rawan Kemacetan	5 titik	4 titik	3 titik	2 titik	1 titik	Renstra 2019 - 2023 Dishub Kota Cirebon	
Meningkatkan Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat	Tersedianya Angkutan Umum Masal Yang Ramah Lingkungan	Tingkat Penggunaan Angkutan Umum (Moda Share)	40%	50%	60%	70%	80%	Renstra 2019 - 2023 Dishub Kota Cirebon	
		Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Armada	5 unit	7 unit	8 unit	9 unit	10 unit	Renstra 2019 - 2023 Dishub Kota Cirebon	

## 2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Tahun 2020 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra DISHUB dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan memperhatikan besarnya anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah disusun maka untuk mewujudkan hal tersebut dituangkan melalui rencana program dan kegiatan dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Adapun uraian perjanjian kinerja DISHUB Tahun 2021 tersebut sebagai berikut :

**Tabel. 2.4**

**Perjanjian Kinerja DISHUB Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas	Jumlah Titik Rawan Kemacetan Dari 5 Titik Menjadi 4 Titik	3 titik
2	Tersedianya Angkutan Umum Massal Yang Ramah Lingkungan	Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Armada	8 unit
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021

## 2.5 Rencana Anggaran

Untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaiannya pada tahun 2021, pelaksanaan program dan kegiatan untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DISHUB Kota Cirebon tahun 2021:

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Jalan		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Rp 23.962.533.000
	Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Rp 274.401.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.887.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 2.328.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 2.328.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 2.328.000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 2.328.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 251.037.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 9.165.000
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Rp 12.849.116.600
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 12.846.096.600
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 3.020.000
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Rp 138.071.000
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 138.071.000
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rp 527.677.800
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 59.191.500
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 17.360.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 54.266.300
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 184.210.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 14.500.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 198.150.000
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Rp 124.783.300
		Pengadaan Mebel	Rp 20.336.700
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 89.064.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 15.382.600
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp 9.539.290.000

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 8.752.500.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 786.790.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp 509.193.300
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 49.530.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 411.727.500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp -
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 30.095.800
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 17.840.000
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Rp 5.019.518.360
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	Rp 484.745.900
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp -
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp 484.745.900
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	Rp 758.642.710
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	Rp 758.642.710
	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	Rp 99.450.000
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Rp 99.450.000
	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	Rp 303.250.000
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp -
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 303.250.000
	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	Rp 530.777.500
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 35.400.000
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 284.807.500
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 37.770.000
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 172.800.000

		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Rp 1.279.491.250
		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rp 523.491.650
		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp 723.638.600
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 12.361.000
		<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	Rp -
		Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Rp -
		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp 1.563.161.000
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.563.161.000
		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp -
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 28.982.051.360</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021 disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja Dinas Perhubungan selama tahun 2021 sebagai pelaksanaan amanah yang diemban organisasi. Isi dari akuntabilitas kinerja tersebut merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan penjabarannya, penjelasan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Dinas Perhubungan.

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Dalam proses pengukuran capaian kinerja ini perlu diperhatikan pula prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas.

##### **3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja**

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan urusan Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2018-2023, perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian Misi Daerah Kota Cirebon tahun 2018-2023. Terdapat 1 (satu) rumusan Misi Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 yang perlu mendapat dukungan dan diaktualisasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon yaitu : **Misi ke-3 "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan."**

Sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Cirebon yaitu:

- 1) Menurunnya titik rawan kemacetan lalu lintas;
- 2) Tersedianya angkutan umum massal yang ramah lingkungan;
- 3) Meningkatnya kinerja pelayanan publik.

Hal ini merupakan upaya pendukung Visi Misi Kota Cirebon khususnya pada Misi 3 Pemerintah Daerah Kota Cirebon "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan". Untuk menunjang misi ke-3 berikut ini merupakan hasil pengukuran indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Tahun 2021 :

**Tabel 3.1**  
**Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama DISHUB Tahun 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas	Jumlah Titik Rawan Kemacetan	3 titik	3 titik	100%
2	Tersedianya Angkutan Umum Masal Yang Ramah Lingkungan	Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Armada	8 unit	8 unit	100%
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	90%	100%
Rata-rata					100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan capaian kinerjanya **100%**.

### **3.1.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Di sub bagian ini akan dijelaskan mengenai pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja pada sasaran yang dimiliki Dinas Perhubungan pada Tahun 2021. Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan / beberapa tahun yang lalu. Selain itu juga evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

**Sasaran 1 : “Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas”**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran menurunnya titik rawan kemacetan lalu lintas dengan 1 indikator mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator sasaran tersebut dapat diperlihatkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Sasaran 1 Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas**

Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target	Tercapai / Tidak	Target Akhir Renstra
Jumlah Titik Rawan Kemacetan Dari 4 Titik Menjadi 3 Titik	5 titik	4 titik	3 titik	3 titik	Tercapai	1 titik

Capaian sasaran menurunnya titik rawan kemacetan lalu lintas dengan satu indikator kinerja tahun 2021 terlihat bahwa realisasi capaiannya sudah mencapai target yang ditetapkan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kinerja segmen jalan adalah dengan derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan atau degree of saturation (DS) didefinisikan sebagai rasio arus lalu lintas (smp/jam) terhadap kapasitas (smp/jam) yang digunakan sebagai factor utama dalam penentuan tingkat kinerja segmen jalan. Nilai DS menunjukkan apakah segmen jalan tersebut memiliki masalah kapasitas atau tidak. Derajat kejenuhan dirumuskan seperti persamaan sebagai berikut:

$$DS = \frac{Q}{C}$$

Sumber: MKJI, 1997

Keterangan :

- DS = Derajat kejenuhan (smp/jam)  
 Q = Volume arus total (smp/jam)  
 C = Kapasitas ruas jalan (smp/jam)

Tabel3.3  
 Tingkat Pelayanan Jalan atau *Level of Service* (LOS)

Tingkat Pelayanan Jalan	Karakteristik Lalu Lintas	Q/C
A	Kondisi arus lalu lintas bebas dengan kecepatan tinggi dan volume lalu lintas rendah	0,00-0,20
B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas.	0,20-0,44
C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan.	0,45-0,74
D	Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dapat dikendalikan, V.C Ratio masih dapat ditolerir	0,75-0,84
E	Arus tidak stabil, kecepatan terkadang terhenti, permintaan sudah mendekati kapasitas	0,85-1
F	Arus dipaksakan, kecepatan rendah, volume di atas kapasitas, antrian panjang (macet)	$\geq 1,00$

Tabel 3.4

No.	Nama Ruas Jalan	Volume (V)	Kapasitas ( C )	V/C Ratio	LOS (Level of Service)
1	Siliwangi	1207,65	2695,68	0,45	B
2	Dr.CiptoMangunkusumo	2031,9	2854,17	0,71	C
3	Pemuda	1798,2	2484	0,72	C
4	Pekiringan	2001	2648	0,76	D

Ada beberapa faktor yang mendukung Pencapaian target indicator kinerja pada Sasaran 1 yaitu:

- Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas dalam rangka mengurangi pergerakan arus lalu lintas khususnya kaitan dengan penyekatan pandemi covid 19 tahun 2021.



**Gambar 3.1** Pengaturan lalu lintas oleh Tim DALOPS

- Perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum oleh tim PJU yang selalu siap untuk membuat cirebon selalu terang.



**Gambar 3.2** Perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum oleh Tim PJU

- Adanya Giat 68 yaitu pelaksanaan penjagaan pada simpang – simpang besar di Kota Cirebon dari jam 6 pagi sampai dengan jam 8 pagi.



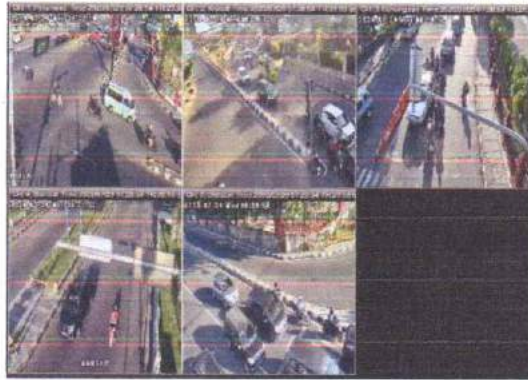
**Gambar 3.3** Giat 68 oleh anggota Dinas Perhubungan Kota Cirebon

- Pembatasan aktivitas dengan penutupan dan pengalihan arus di sejumlah ruas jalan di Kota Cirebon.



**Gambar 3.4** Penutupan ruas jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon

- Pengendalian lalu lintas yang terpusat dan terpantau di ruang Area Traffic Control System.



**Gambar 3.5** Pantauan Lalu Lintas dari ATCS Dishub Kota Cirebon

- Perbaikan rambu-rambu dan lampu isyarat lalu lintas guna untuk mendukung Cirebon menjadi kota yang tertib lalu lintas.



**Gambar 3.6** Perbaikan Lampu Insyarat Lalu Lintas Oleh Tim yang bertugas

- Webinar dengan tema "Sosialisasi Keselamatan Pesepeda di Jalan" dengan narasumber Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang dilakukan di Cirebon Comand Center.



**Gambar 3.7** Webinar dengan Kepala Dinas Perhubungan terkait Sosialisasi Keselamatan Pesepeda di Jalan

- Kegiatan operasi masker oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon dan SKPD lainnya guna untuk membantu memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Cirebon.



**Gambar 3.8** Kegiatan operasi masker oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon dan SKPD lainnya

- Kegiatan PAM Pengamanan dalam rangka Natal 2021 dan Tahun Baru 2021 di beberapa titik di Kota Cirebon bersama dengan instansi terkait.



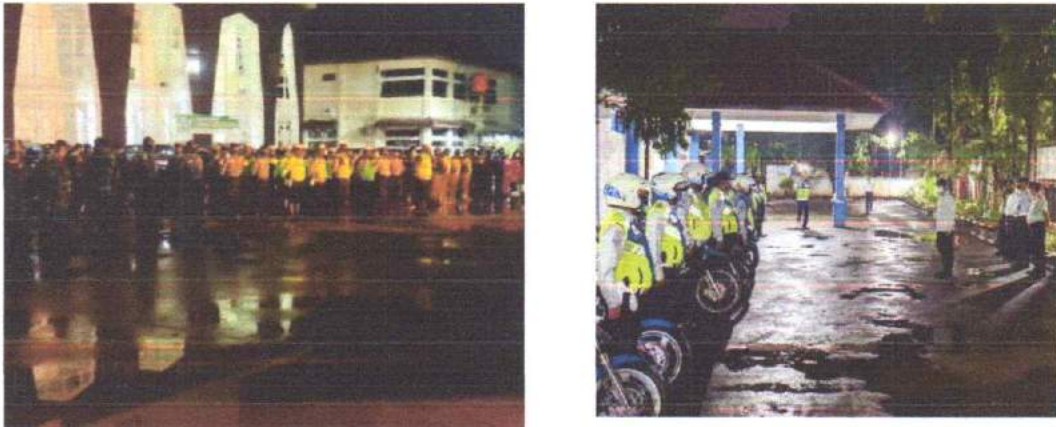
**Gambar 3.9** Kegiatan PAM Pengamanan dalam rangka Natal 2021 dan Tahun Baru 2022

- Kegiatan dialog interaktif dengan topik Teknologi ATCS meminimalisir kecelakaan lalu lintas bersama Kepala Dinas Perhubungan live di RRI Pro Kota Cirebon.



**Gambar 3.10** Dialog interaktif dengan topik Teknologi ATCS meminimalisir kecelakaan lalu lintas bersama Kepala Dinas Perhubungan live di RRI Pro Kota Cirebon

- Kegiatan Apel gelar pasukan Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam rangka pengamanan Tahun Baru 2022 dengan instansi terkait.



**Gambar IV.11** Kegiatan Apel gelar pasukan Dinas Perhubungan Kota Cirebon

**Sasaran 2 : “Tersedianya Angkutan Umum Massal Yang Ramah Lingkungan”**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran tersedianya angkutan umum massal yang ramah lingkungan dengan 1 indikator mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator sasaran tersebut dapat diperlihatkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**

**Capaian Sasaran 1 Tersedianya Angkutan Umum Massal Yang Ramah Lingkungan**

Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target	Tercapai / Tidak	Realisasi 2021	Target Akhir Renstra
Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Armada	5 unit	10 unit	7 unit	Tercapai	10 unit	10 unit

Capaian sasaran tersedianya angkutan umum massal Yang ramah lingkungan dengan satu indikator kinerja tahun 2021 terlihat bahwa realisasi capaiannya sudah mencapai target

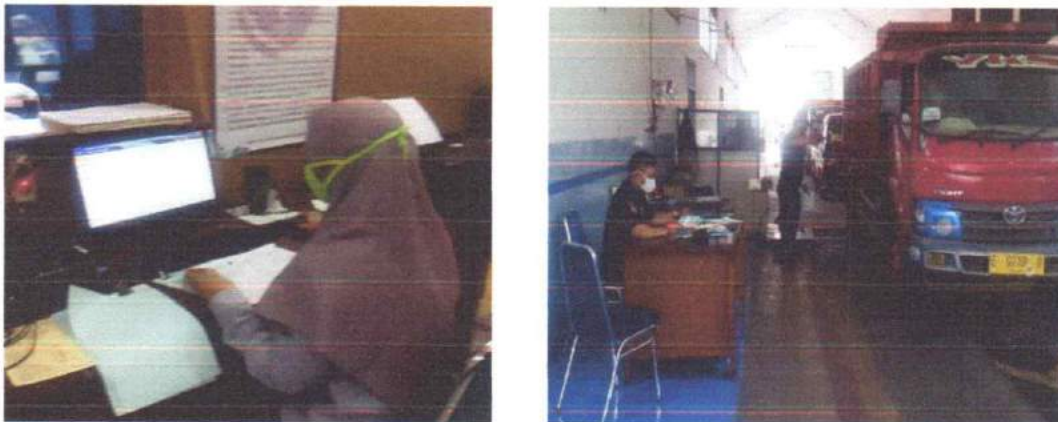
yang ditetapkan. Ada beberapa faktor yang mendukung Pencapaian target indicator kinerja pada Sasaran 2 yaitu:

- Kunjungan wakil Wali Kota Cirebon ke UPTD PPP yang didampingi dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon beserta dengan jajarannya untuk membahas terkait fungsionalisasi Taman Edukasi Lalu Lintas, Operasional Bus BRT dan Program Bike Sharing.



**Gambar 3.12** Kegiatan Kunjungan Wali Kota Cirebon bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon beserta jajarannya

- Adanya kegiatan pengujian kendaraan bermotor agar mengetahui kendaraan tersebut laik jalan atau tidak.



**Gambar 3.13** Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Penguji PKB

**Tabel 3.6** Data Kendaraan PKB Kota Cirebon Tahun 2021

No	JenisKendaraan	Lulus Uji	Tidak Lulus
1	Taksi	-	-
2	Angkutan Kota	260	-
3	Kereta Tempelan	345	-
4	Bus	219	-
5	Mobil Barang	7840	-
6	Kereta Gandengan	385	-
TOTAL		9049	0

- Tersedianya pemeliharaan sarana tempat – tempat pemberhentian angkutan umum (halte) yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jasa angkutan umum.
- Pemeliharaan terhadap fasilitas prasarana lalu lintas (halte) yang dilakukan oleh bidang lalu lintas agar selalu berfungsi sesuai dengan fungsi nya.
- Adanya Angkutan masal berupa Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Cirebon.



**Gambar 3.14** Bus Rapid Transit (BRT)

- Adanya angkutan umum berbasis aplikasi (online) yang diharapkan dapat mencakup pelayanan angkutan umum serta memberikan pelayanan yang aman, nyaman dan selamat kepada pengguna jasa angkutan umum.

### Sasaran 3 : "Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik"

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dengan 1 indikator mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator sasaran tersebut dapat diperlihatkan pada tabel berikut :

**Tabel 9**  
**Capaian Sasaran 1 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik**

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Tercapai / Tidak	Realisasi 2021	Target Akhir Renstra
Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	90%	Tercapai	90%	100%

Capaian sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dengan 1 indikator kinerja terlihat bahwa realisasi capaiannya sudah mencapai target yang ditetapkan. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Kegiatan pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan melalui penyebaran kuisisioner dengan menggunakan metode sampling kepada pelanggan yang akan melakukan pelayanan. Dari 3 UPT yaitu UPT PJU, UPT PKB, dan UPT Parkir yang dijadikan tempat untuk survai indeks kepuasan masyarakat. Dimana dalam realisasinya mendapatkan hasil sebesar 90%.

### 3.2 Akuntabilitas Keuangan

#### 3.2.1 Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 28.982.051.360 dengan rincian:

- a. Belanja Tidak Langsung (Gaji Pegawai) sebesar Rp. 12.846.096.600,- dengan realisasi sebesar **100%**.
- b. Belanja Langsung (Kegiatan) sebesar Rp. 16.135.954.760,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.789.686.054,- atau **92%**.

#### **Perbandingan Anggaran periode 2020 – 2021**

(dalam ribuan rupiah)



Jika dibandingkan dengan tahun 2020 program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon tahun 2021 pencapaian kinerja yang dilaksanakan lebih rendah. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain adanya refocusing penanganan pandemi Covid 19. Meski lebih rendah capaiannya, secara keseluruhan pencapaian program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam hal pencapaian kinerja sangat baik.

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)**  
**CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
1.1	BIDANG PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON	Tinggi dan tepat guna, membangun sistem angkutan massal, meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan umum melalui peremajaan armada bus sedang, penambahan dan penataan trayek, penataan tempat pemberhentian angkutan umum serta pelayanan hari-hari besar							
				1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masukan: - Dana Outcome : Tenujudnya Tertib Pelayanan Administrasi Perkantoran	23.944.533.000	22.577.437.698		
				1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan: - Dana	274.401.000	274.401.000		
				1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output : - Dokumen Renja PD - Dokumen Renja PD Perubahan - Dokumen Renstra PD - Dokumen Renstra Perubahan PD	4.887.000	4.887.000		
				1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Masukan: - Dana Output : - Dokumen RKA	2.328.000	2.328.000		
				1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Masukan: - Dana Output : - Dokumen RKAP	2.328.000	2.328.000		
				1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Masukan: - Dana Output : - Dokumen DPA	2.328.000	2.328.000		
				1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan	Masukan: - Dana	2.328.000	2.328.000		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Perubahan DPA-SKPD	Output : - Dokumen DPPA	1 Dokumen	1 Dokumen			
				1.1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Masukan: - Dana Output : - Laporan pelaksanaan realisasi kinerja tahunan - Laporan pelaksanaan - Laporan PK - Tersedianya Honor PTT	251.037.000  1 dokumen  4 dokumen 1 dokumen 1 orang	251.037.000  1 dokumen  4 dokumen 1 dokumen 2 orang			
				1.1.7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output : - Dokumen Dalev Triwulan I, II, dan III Tahun 2021 - Dokumen Dalev Triwulan - Dokumen SOP Dishub - LAKIP - LKPJ - LPPD	9.165.000  3 dokumen  1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	9.165.000  3 dokumen  1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen			
				1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masukan: - Dana	12.849.116.600	12.454.475.850			
				1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan: - Dana Output : - Tersedianya Gaji dan	12.846.096.600  117 orang	12.451.455.850  117 orang			
				1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Masukan: - Dana Output : - Laporan keuangan akhir	3.020.000  1 dokumen	3.020.000  1 dokumen			
				1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Masukan: - Dana	138.071.000	136.766.000			
				1.3.1 Sub Kegiatan Pemeliharaan Dalam	Masukan:					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masukan: - Dana  Output : - Alat Tulis Kantor - Materai 3000 - Materai 6000	527.677.800  22 jenis	436.195.366			
				1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan: - Dana  Output : - Isi tabung LPG 12 kg - Tabung APAR	59.191.500  12 kail 20 unit	56.167.300			
				1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masukan: - Dana  Output : - Barang cetakan - Pengandaan	17.360.000  11 jenis 51956 lembar	41.291.800			
				1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Masukan: - Dana  Output : - Buku / Peraturan - Perundang-undangan - Surat Kabar Harian Lokal - Surat Kabar Harian Nasional - Surat Kabar Harian Regional/Provinsi - Teresangnya iklan di surat kabar harian	194.210.000  5 buku 3 koran/ media 1 koran/ media 1 koran/ media 60 iklan	170.569.000			
				1.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Masukan: - Dana  Output : - Laporan penerimaan/ kunjungan tamu	14.500.000  12 laporan	12.400.000			
				1.4.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Masukan: - Dana  Output : - Laporan penerimaan/ kunjungan tamu	14.500.000  12 laporan	12.400.000			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1.4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan: - Dana Output : Laporan makanan dan minuman harian pegawai Laporan/ Notulensi rapat Internal/briefing Laporan hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Laporan sirergias	198.150.000 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 1 laporan	153.847.296			
				1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Masukan: - Dana Output : Mebelieur	124.783.300 20.336.700 2 jenis	121.485.700 19.426.700			
				1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Masukan: - Dana Output : Mebelieur	20.336.700 2 jenis	19.426.700			
				1.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan: - Dana Output : Peralatan gedung kantor	89.064.000 4 jenis	87.019.000			
				1.5.3 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan: - Dana Output : Perlengkapan gedung kantor	15.382.600 1 jenis	15.040.000			
				1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan: - Dana Output :	9.521.290.000 1 jenis	8.750.698.771			
				1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan: - Dana Output :	8.752.500.000	7.982.048.771			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<p>Struk pembayaran tagihan rekening air</p> <p>Struk pembayaran tagihan rekening telepon</p> <p>Struk pembayaran tagihan rekening TV</p> <p>Struk pembayaran tagihan rekening listrik</p>	<p>36 Struk/ Rekening</p> <p>36 Struk/ Rekening</p> <p>12 Struk/ Rekening</p> <p>36 Struk/ Rekening</p>				
				1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<p>Masukan:</p> <p>- Dana</p> <p>Output :</p> <p>- Pelugas/Tenaga pengantaraan</p> <p>- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih</p> <p>- Pelugas/ Tenaga kebersihan kantor</p>	<p>509.193.300</p> <p>403.414.991</p>				
				1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<p>Masukan:</p> <p>- Dana</p> <p>Output :</p> <p>- BBM Kendaraan R4</p> <p>- Pelumas Kendaraan R4</p> <p>- Servis Kendaraan R4</p> <p>- Suku cadang Kendaraan R4</p> <p>- STNK/SKPD PKB R4</p>	<p>49.530.000</p> <p>32.690.807</p>				
				1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perzinahan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<p>Masukan:</p> <p>- Dana</p> <p>Output :</p> <p>- BBM Kendaraan R2</p> <p>- BBM Kendaraan R3</p> <p>- BBM Kendaraan R4</p> <p>- BBM Kendaraan R6</p> <p>- KIR Pick Up</p> <p>- KIR Truk</p> <p>- Pelumas Kendaraan R2</p>	<p>411.727.500</p> <p>330.277.384</p>				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSAMA	KEBLUKAAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1.7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<b>Masukan:</b> - Dana <b>Output :</b> - Gedung kantor - Pemagaran dan pembuatan gapura kantor - Dukung Semar - Pengaspalan Terminal - Dukung Semar	3 unit kantor 28 m 400 m2	-			
				1.7.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>Masukan:</b> - Dana <b>Output :</b> Peralatan gedung kantor	30.095.800 10 jenis	22.606.800			
				1.7.5 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>Masukan:</b> - Dana <b>Output :</b> Perleengkapan gedung kantor	17.840.000 2 jenis	17.840.000			
				2 Program Penyelenggaraan Laju Lintas dan Angkutan Jalan	<b>Masukan:</b> - Dana <b>Output :</b>	9.019.518.360	4.710.274.402			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(LRAJ)						
				2.1 Kegiatan Penyediaan Perleengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Masukan: - Dana	5.243.398.610	1.137.727.282			
				2.1.1 Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output : - Pembangunan Halte - Kajian pembangunan fasilitas halte	0 4 unit	0			
				2.1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Perleengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Masukan: - Dana Output : - Kendaran Operasional - Pelayanan UPT PJU (Crane) - Pemassangan PJU - Pemeliharaan PJU di 5 Kecamatan	4.758.642.710 0 unit 144 titik 8114 titik	664.167.782	Banyak PJU yang tidak berfungsi!	- Mengganti lampu PJU yang mati; - Mengganti suku cadang PJU yang rusak; - Merapikan kabel yang turun; - Memegakkan tang yang miring; - Mengganti KWH meter yang rusak/terbakar	- Mengajukan bantuan keuangan untuk PJU. - Berkoordinasi dengan DPR/KP untuk menhngkas pohon yang menutupi PJU. - Berkoordinasi dengan warga sekitar PJU agar segera lapor ke dinas perhubungan bila ada PJU yang tidak berfungsi. - Mengajukan CSR ke produsen PJU
				2.1.3 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perleengkapan Jalan	Masukan: - Dana Output : - Bertungsinnya marka jalan untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas - Bertungsinnya rambu lalu lintas untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas - Tersedianya Operator ATCS Dinas Perhubungan Kota Cirebon	484.745.900 0 m2 150 buah 2 orang	473.559.500			
				2.2 Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Masukan: - Dana	98.450.000	98.340.000			
						28 titik/ simpang				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBUJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2.2.1 Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Masukan: - Dana Output : Tersedianya pelayanan terminal tipe C	99.450.000  1 tahun	98.340.000  1 tahun			
				2.3 Kegiatan Penerimaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Masukan: - Dana	303.250.000	302.445.250			
				2.3.1 Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan	Masukan: - Dana Output : Pembinaan Pelugas Parkir Pembelian Pelugas Parkir	0  280 orang 0 kail	0			
				2.3.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output : Alat Tulis Kantor UPT Parkir BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Cetak Kwitansi dan Karcis Retribusi Parkir Dokumen Kajian Parkir Pakaian Juru Parkir Penggandaan UPT Parkir Tersedianya Honor PTT	303.250.000  24 jenis 12 bulan 12400 buku 0 dokumen 0 stail 6806 lembar 1 orang	302.445.250	Parkir badan jalan yang semerawut	- Peningkatan ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas. - Peningkatan pendapatan asli daerah	- Perbaikan dan pembinnaan fasilitas parkir pada areal minimarket dan atau sejenisnya (areal parkir maksimal 250 meter persegi); - Penataan parkir zona dan bukan zona; - Penataan parkir basement
				2.4 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Masukan: - Dana	530.777.500	515.395.500			
				2.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Masukan: - Dana Output : BBM dan Oli Genset - Tab	35.400.000  1 tahun 3 unit	32.450.000  1 tahun			


NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Masukan: - Dana Output : Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	284.807.500  2 jenis	272.457.500			
				2.4.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Masukan: - Dana Output : Servis Alat Uji	37.770.000  1 tahun	37.888.000			
				2.4.4 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Masukan: - Dana Output : Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	172.800.000  12 laporan	172.800.000			
				2.5 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana	1.279.491.250	1.173.804.820			
				2.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkap Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Masukan: - Dana Output : - Halte - Marka Jalan - Paku Jalan - Rambu - rambu lalu lintas untuk menunjang keselamatan dan kelancaran berlalu lintas - Separator	523.491.650  4 unit 1570,5 mm <sup>2</sup> 0 buah 109 buah 0 buah	468.180.220			
				2.5.2 Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output : Sosialisasi terkait kebijakan teknis perhubungan	20.000.000  1 kali	20.000.000			
				2.5.3 Sub Kegiatan Pemantauan dan	Masukan:					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBUJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUALT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<p>2.5.4 Sub Kegiatan Forum Laju Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>Masukkan: - Dana 12.361.000</p> <p>Output : Forum Perangkat Daerah 2 dokumen</p>	<p>Masukkan: - Dana 11.896.000</p>					
				<p>2.6 Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAU di Jalan</p> <p>Masukkan: - Dana</p>	<p>Masukkan: - Dana</p> <p>Output : Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Laju Lintas Tingkat Kota 30 peserta</p> <p>Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan Laju Lintas Tingkat Kota 3 peserta</p> <p>Tersedianya dokumen hasil audit dan investigasi keselamatan lalu lintas 0 dokumen</p>					
				<p>2.6.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAU</p> <p>Masukkan: - Dana 0</p> <p>Output : Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Laju Lintas Tingkat Kota 30 peserta</p>	<p>Masukkan: - Dana 0</p> <p>Output : Dokumen lomba tertib lalu lintas dan angkutan jalan (WTTN) 1 dokumen</p> <p>Penyuluhan keselamatan pengguna kendaraan bermotor 48 kali</p> <p>Sosialisasi penggunaan angkutan umum pada masyarakat 12 kali</p>					
				<p>2.6.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</p> <p>Masukkan: - Dana 0</p> <p>Output : Dokumen lomba tertib lalu lintas dan angkutan jalan (WTTN) 1 dokumen</p> <p>Penyuluhan keselamatan pengguna kendaraan bermotor 48 kali</p> <p>Sosialisasi penggunaan angkutan umum pada masyarakat 12 kali</p>	<p>Masukkan: - Dana 0</p> <p>Output : Dokumen lomba tertib lalu lintas dan angkutan jalan (WTTN) 1 dokumen</p> <p>Penyuluhan keselamatan pengguna kendaraan bermotor 48 kali</p> <p>Sosialisasi penggunaan angkutan umum pada masyarakat 12 kali</p>					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBUJAKKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2.7 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	Masukkan: - Dana	2 kali 4 kali	1.563.161.000 1.482.561.550			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output : Trayek BRT di Kota Cirebon	1.563.161.000  1 lintas trayek	1.482.561.550			
				2.8 Kegiatan Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output : Pembinaan sopir / awak angkutan umum - Pemilihan awak angkutan umum, teladan tingkat kota Cirebon	0  40 orang  3 orang	0			
				2.8.1 Sub Kegiatan Fasilitas/pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Masukan: - Dana Output : Pembinaan sopir / awak angkutan umum - Pemilihan awak angkutan umum, teladan tingkat kota Cirebon - Terciptanya pengetahuan bagi para sopir/puru mudi terhadap aturan dalam berlalu lintas di jalan - Tidentifikasinya armada dan krew angkutan kota di masing-masing trayek	0  50 orang  0 orang	0			
Jumlah						32.964.051.360	27.287.712.100			

Cirebon, Januari 2022,  
Kepala Perangkat Daerah

  
Drs. ANDI ARMAWAN  
NIP. 19691214 199003 1 005

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pagu Anggaran Belanja Langsung Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2021 mengalami penurunan dari Tahun 2020, dimana tahun 2020 sebesar Rp. 33.884.557.000 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp 28.982.051.360. Dengan menurunnya PAGU Belanja Langsung, Dinas Perhubungan Kota Cirebon mampu melaksanakan dan merealisasikan kegiatan yang ada. Dalam pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2021 secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran yang ditetapkan telah dapat dicapai dengan sangat baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Dinas Perhubungan secara umum dapat melaksanakan seluruh kegiatan dengan sangat baik dan berhasil pada tahun 2021. Hasil yang telah dicapai di Tahun ini tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun - tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas kinerja pemerintah.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan yang telah tercapai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Cirebon antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa dampak kepada peningkatan kualitas manajemen organisasi. Hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian realisasi target pada indikator adalah hasil yang sangat baik, dengan adanya partisipasi dari pihak terkait lainnya.



**PEMERINTAH KOTA CIREBON**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

Ususan Pemerintahan : 2.09  
 Unit Organisasi : 2.09.2.09.01  
 Sub Unit Organisasi : 2.09.2.09.01.01

Ususan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan  
 DIMAS PERHUBUNGAN  
 DIMAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
4.1.2	<b>Retribusi Daerah</b>					
4.1.2.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.661.073.350,00	0,00	3.942.128.241,00	3.942.128.241,00	(2.718.945.109,00)
4.1.2.04.01	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.661.073.350,00	0,00	3.942.128.241,00	3.942.128.241,00	(2.718.945.109,00)
4.1.2.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.637.073.350,00	0,00	1.887.600.500,00	1.887.600.500,00	(2.749.472.850,00)
4.1.2.06.01	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.637.073.350,00	0,00	1.887.600.500,00	1.887.600.500,00	(2.749.472.850,00)
4.1.2.18	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.000.000.000,00	0,00	2.029.607.741,00	2.029.607.741,00	29.607.741,00
4.1.2.18.01	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.000.000.000,00	0,00	2.029.607.741,00	2.029.607.741,00	29.607.741,00
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>					
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.982.051.360,00	0,00	27.287.712.100,00	27.287.712.100,00	(5.694.339.260,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji Pokok ASN	12.893.662.600,00	0,00	12.481.488.850,00	12.481.488.850,00	(412.173.750,00)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS	12.893.662.600,00	0,00	12.481.488.850,00	12.481.488.850,00	(412.173.750,00)
5.1.1.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	5.173.532.840,00	0,00	5.113.578.440,00	5.113.578.440,00	(59.954.400,00)
5.1.1.02.01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.173.532.840,00	0,00	5.113.578.440,00	5.113.578.440,00	(59.954.400,00)
5.1.1.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	566.401.000,00	0,00	557.619.404,00	557.619.404,00	(8.781.596,00)
5.1.1.03.01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	566.401.000,00	0,00	557.619.404,00	557.619.404,00	(8.781.596,00)
5.1.1.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	213.570.000,00	0,00	208.170.000,00	208.170.000,00	(5.400.000,00)
5.1.1.04.01	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	213.570.000,00	0,00	208.170.000,00	208.170.000,00	(5.400.000,00)
5.1.1.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.490.000,00	0,00	29.170.000,00	29.170.000,00	(1.320.000,00)
5.1.1.05.01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	30.490.000,00	0,00	29.170.000,00	29.170.000,00	(1.320.000,00)
5.1.1.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	217.445.000,00	0,00	212.925.000,00	212.925.000,00	(4.520.000,00)
5.1.1.06.01	Belanja Tunjangan Beras PNS	217.445.000,00	0,00	212.925.000,00	212.925.000,00	(4.520.000,00)
5.1.1.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	340.292.000,00	0,00	334.870.080,00	334.870.080,00	(5.421.920,00)
5.1.1.07.01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	340.292.000,00	0,00	334.870.080,00	334.870.080,00	(5.421.920,00)
		15.829.000,00	0,00	17.127.092,00	17.127.092,00	1.298.092,00
		15.829.000,00	0,00	17.127.092,00	17.127.092,00	1.298.092,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	
5.1.1.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	73.760,00	0,00	68.306,00	(5.454,00)
5.1.1.08.01	Belanja Pembulatan Gaji PNS	73.760,00	0,00	68.306,00	(5.454,00)
5.1.1.09	Belanja Turan Jaminan Kesehatan ASN	406.263.000,00	0,00	402.546.890,00	(3.716.110,00)
5.1.1.09.01	Belanja Turan Jaminan Kesehatan PNS	406.263.000,00	0,00	402.546.890,00	(3.716.110,00)
5.1.1.10	Belanja Turan Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.605.000,00	0,00	10.452.822,00	(152.178,00)
5.1.1.10.01	Belanja Turan Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.605.000,00	0,00	10.452.822,00	(152.178,00)
5.1.1.11	Belanja Turan Jaminan Kemetaan ASN	31.815.000,00	0,00	31.358.547,00	(456.453,00)
5.1.1.11.01	Belanja Turan Jaminan Kemetaan PNS	31.815.000,00	0,00	31.358.547,00	(456.453,00)
5.1.1.13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.506.226.000,00	0,00	5.458.569.269,00	(48.156.731,00)
5.1.1.13.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.506.226.000,00	0,00	5.458.569.269,00	(48.156.731,00)
5.1.1.13.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.506.226.000,00	0,00	5.458.569.269,00	(48.156.731,00)
5.1.1.19	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	333.054.000,00	0,00	75.000.000,00	(258.054.000,00)
5.1.1.19.04	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	231.838.658,00	0,00	0,00	(231.838.658,00)
5.1.1.19.06	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	100.015.349,00	0,00	75.000.000,00	(25.015.349,00)
5.1.1.19.18	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1.198.993,00	0,00	0,00	(1.198.993,00)
5.1.1.24	Belanja Honorarium	47.566.000,00	0,00	30.033.000,00	(17.533.000,00)
5.1.1.24.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	44.785.000,00	0,00	27.334.000,00	(17.451.000,00)
5.1.1.24.02	Belanja Honorarium Pengabdian Barang/Jasa	2.781.000,00	0,00	2.699.000,00	(82.000,00)
5.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.02.01	Belanja Subsidi kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	20.088.388.760,00	0,00	14.806.223.250,00	(5.282.165.510,00)
5.2.1	Belanja Barang dan Jasa	18.114.740.310,00	0,00	14.504.282.250,00	(3.610.458.060,00)
5.2.1.01	Belanja Barang Pokai Habis	3.047.070.560,00	0,00	2.710.394.619,00	(336.675.941,00)
5.2.1.01.01	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	963.473.160,00	0,00	855.757.274,00	(107.715.886,00)
5.2.1.01.10	Belanja Bahan-lisi Tabung Gas	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00
5.2.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	154.234.600,00	0,00	125.904.200,00	(28.330.400,00)
5.2.1.01.16	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00
5.2.1.01.23	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	110.725.600,00	0,00	110.715.600,00	(10.000,00)
5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	108.217.700,00	0,00	94.378.800,00	(13.838.900,00)
5.2.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	520.419.200,00	0,00	496.413.200,00	(24.006.000,00)
5.2.1.01.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6.300.000,00	0,00	4.200.000,00	(2.100.000,00)
5.2.1.01.29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	7.700.000,00	0,00	0,00	(7.700.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.1.01.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	405.698.300,00	0,00	317.604.325,00	317.604.325,00	(88.093.975,00)
5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	329.114.500,00	0,00	328.239.720,00	328.239.720,00	(874.780,00)
5.2.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obahan Lainnya	7.894.000,00	0,00	0,00	0,00	(7.894.000,00)
5.2.1.01.45	Belanja Nauru dan Pakan-Nauru dan Pakan Lainnya	15.276.000,00	0,00	15.276.000,00	15.276.000,00	0,00
5.2.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	313.932.000,00	0,00	265.764.000,00	265.764.000,00	(48.168.000,00)
5.2.1.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.170.000,00	0,00	32.970.000,00	32.970.000,00	(7.200.000,00)
5.2.1.01.64	Belanja Pakalan Dinas Lapangan (POL)	60.925.500,00	0,00	60.171.500,00	60.171.500,00	(754.000,00)
5.2.1.01.70	Belanja Pakalan Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	145.947.500,00	0,00	143.800.000,00	143.800.000,00	(2.147.500,00)
5.2.1.02.04	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	145.947.500,00	0,00	143.800.000,00	143.800.000,00	(2.147.500,00)
5.2.1.04	Belanja Jasa Kantor	12.000.824.950,00	0,00	11.121.747.721,00	11.121.747.721,00	(879.077.229,00)
5.2.1.04.03	Honorarium Nersumber atau Rembhas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.670.000,00	0,00	27.670.000,00	27.670.000,00	0,00
5.2.1.04.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.330.000,00	0,00	9.330.000,00	9.330.000,00	0,00
5.2.1.04.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.110.000,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	(1.550.000,00)
5.2.1.04.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	505.500.000,00	0,00	505.500.000,00	505.500.000,00	0,00
5.2.1.04.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	439.500.000,00	0,00	438.000.000,00	438.000.000,00	(1.500.000,00)
5.2.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	457.388.000,00	0,00	457.388.000,00	457.388.000,00	0,00
5.2.1.04.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	317.080.000,00	0,00	316.600.000,00	316.600.000,00	(480.000,00)
5.2.1.04.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	560.000.000,00	0,00	554.600.000,00	554.600.000,00	(5.400.000,00)
5.2.1.04.35	Belanja Jasa Tenaga Teknik Mekanik dan Listrik	99.537.000,00	0,00	27.780.000,00	27.780.000,00	(71.757.000,00)
5.2.1.04.41	Belanja Jasa Penanganan Tindakan Telepon, Air, dan Listrik	201.342.450,00	0,00	201.085.550,00	201.085.550,00	(256.900,00)
5.2.1.04.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.950.000,00)
5.2.1.04.50	Belanja Jasa Kalibrasi	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.2.1.04.54	Belanja Jasa Jalan/Tol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.04.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Promotretan	163.758.000,00	0,00	163.150.000,00	163.150.000,00	(608.000,00)
5.2.1.04.59	Belanja Tagihan Telepon	6.000.000,00	0,00	414.804,00	414.804,00	(5.585.196,00)
5.2.1.04.60	Belanja Tagihan Air	14.400.000,00	0,00	8.578.600,00	8.578.600,00	(5.821.400,00)
5.2.1.04.61	Belanja Tagihan Listrik	8.700.300.000,00	0,00	7.952.735.358,00	7.952.735.358,00	(747.564.642,00)
5.2.1.04.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	30.952.000,00	0,00	17.919.000,00	17.919.000,00	(13.033.000,00)
5.2.1.04.63	Belanja Kawal/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	340.075.000,00	0,00	330.541.009,00	330.541.009,00	(11.533.991,00)
5.2.1.04.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	109.932.500,00	0,00	99.895.400,00	99.895.400,00	(10.037.100,00)
5.2.1.05	Belanja Turan Jamihan/Asuransi	102.000.000,00	0,00	101.660.000,00	101.660.000,00	(340.000,00)
5.2.1.05.08	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	102.000.000,00	0,00	101.660.000,00	101.660.000,00	(340.000,00)
5.2.1.06	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
5.2.1.06.02	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.1.07	Belanja Sewa Perlatan dan Mesin	63.140.000,00	0,00	23.520.000,00	23.520.000,00	(39.620.000,00)
5.2.1.07.12	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.500.000,00)
5.2.1.07.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.07.17	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	52.940.000,00	0,00	20.640.000,00	20.640.000,00	(32.300.000,00)
5.2.1.07.18	Belanja Sewa Mebel	8.700.000,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	(5.820.000,00)
5.2.1.08	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.250.000,00)
5.2.1.08.43	Belanja Sewa Hotel	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.250.000,00)
5.2.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	315.220.000,00	0,00	259.549.910,00	259.549.910,00	(56.170.090,00)
5.2.1.19.35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	106.430.000,00	0,00	95.180.000,00	95.180.000,00	(11.250.000,00)
5.2.1.19.37	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	102.500.000,00	0,00	88.315.910,00	88.315.910,00	(14.184.090,00)
5.2.1.19.38	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Benda Dua	59.550.000,00	0,00	44.644.000,00	44.644.000,00	(14.906.000,00)
5.2.1.19.39	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Benda Tiga	14.000.000,00	0,00	1.765.000,00	1.765.000,00	(12.235.000,00)
5.2.1.19.17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	28.240.000,00	0,00	24.645.000,00	24.645.000,00	(3.595.000,00)
5.2.1.19.33	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Penerima-Alat Studio, Perakitan Studio Video dan Film	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.1.21	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Ringal	2.290.177.300,00	0,00	0,00	0,00	(2.290.177.300,00)
5.2.1.21.26	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	2.290.177.300,00	0,00	0,00	0,00	(2.290.177.300,00)
5.2.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.610.000,00	0,00	53.610.000,00	53.610.000,00	(1.000.000,00)
5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.610.000,00	0,00	49.610.000,00	49.610.000,00	(1.000.000,00)
5.2.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.1.25	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.25.01	Belanja Hadiah yang Bersifat Perombaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	290.721.100,00	0,00	251.963.100,00	251.963.100,00	(38.758.000,00)
5.2.3.05	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.338.000,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	(118.000,00)
5.2.3.05.01	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.338.000,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	(118.000,00)
5.2.3.10	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	324.400,00	0,00	324.400,00	324.400,00	0,00
5.2.3.10.02	Belanja Modal Perakitan Bengkel Listrik	324.400,00	0,00	324.400,00	324.400,00	0,00
5.2.3.13	Belanja Modal Alat Kantor	20.076.700,00	0,00	19.426.700,00	19.426.700,00	(650.000,00)
5.2.3.13.05	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	20.076.700,00	0,00	19.426.700,00	19.426.700,00	(650.000,00)
5.2.3.14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	61.557.600,00	0,00	25.510.000,00	25.510.000,00	(36.047.600,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	
5.2.3.14.06	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.617.600,00	0,00	25.510.000,00	(15.107.600,00)
5.2.3.14.07	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	20.940.000,00	0,00	0,00	(20.940.000,00)
5.2.3.17	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.17.01	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.31	Belanja Modal Komputer Unit	59.434.000,00	0,00	51.713.000,00	(7.721.000,00)
5.2.3.31.02	Belanja Modal Personal Computer	59.434.000,00	0,00	51.713.000,00	(7.721.000,00)
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan Komputer	22.532.000,00	0,00	28.616.000,00	6.084.000,00
5.2.3.32.03	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	22.532.000,00	0,00	28.616.000,00	6.084.000,00
5.2.3.32.05	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.48	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	123.458.400,00	0,00	123.153.000,00	(305.400,00)
5.2.3.48.03	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	123.458.400,00	0,00	123.153.000,00	(305.400,00)
5.2.4	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	63.067.350,00	0,00	49.977.900,00	(13.089.450,00)
5.2.4.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	63.067.350,00	0,00	49.977.900,00	(13.089.450,00)
5.2.4.01.32	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	63.067.350,00	0,00	49.977.900,00	(13.089.450,00)
5.2.4.01.36	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	1.619.860.000,00	0,00	0,00	(1.619.860.000,00)
5.2.5.01	Belanja Modal Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.01.02	Belanja Modal Jalan Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.21	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.619.860.000,00	0,00	0,00	(1.619.860.000,00)
5.2.5.21.03	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.619.860.000,00	0,00	0,00	(1.619.860.000,00)
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	(26.320.978.010,00)	0,00	(23.345.583.859,00)	2.975.394.151,00
	<b>SISA LEBIH/ KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(26.320.978.010,00)	0,00	(23.345.583.859,00)	2.975.394.151,00